

Risk Disclosures pada Pelaporan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia

Nina Febriana Dosinta

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

Abstract. *Regional Development Banks are required to innovate and anticipate changes in digitalization in the digital industry era 4.0. Financial Services Authority as the regulator of the Regional Development Banks developed the framework for the 2015 Regional Development Banks Transformation program which covers aspects of business and risk. Therefore, this research aims to investigate whether the annual report is only a single medium for Regional Development Banks risk disclosures. This research uses a content analysis approach in Regional Development Banks reporting in Indonesia in the 2015-2019 period. The research results showed that risk disclosures are not only found in annual reports but also in sustainability reports that are separate from annual reports. This shows that Regional Development Banks not only seeks to detect risks that are disclosed in the annual report but also to anticipate sustainable financial risks that are disclosed in the sustainability report. Through the transformation program makes Regional Development Banks not only have high competitiveness and strong but also can contribute to the growth and equity of the regional economy in Indonesia.*

Keywords. *annual report; sustainability report; reporting; risk disclosures*

Abstrak. Bank Pembangunan Daerah (BPD) dituntut berinovasi serta mengantisipasi perubahan digitalisasi dalam era digital industri 4.0. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator BPD menyusun kerangka kerja program Transformasi BPD tahun 2015 yang mencakup aspek bisnis dan risiko. Oleh karena itu, riset ini bertujuan untuk menginvestigasi apakah laporan tahunan hanya sebagai media tunggal untuk *risk disclosures* BPD. Riset ini menggunakan pendekatan *content analysis* pada pelaporan BPD di Indonesia dalam kurun waktu 2015-2019. Hasil riset menunjukkan bahwa *risk disclosures* tidak hanya terdapat pada laporan tahunan namun juga terdapat pada laporan keberlanjutan yang terpisah dari laporan tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa BPD tidak hanya berupaya mendekteksi risiko yang diungkapkan dalam laporan tahunan namun juga mengantisipasi risiko keuangan berkelanjutan yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan. Melalui program transformasi menjadikan BPD tidak hanya memiliki daya saing yang tinggi serta kuat namun juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan serta pemerataan ekonomi daerah di Indonesia.

Kata kunci: laporan tahunan; laporan keberlanjutan; pelaporan; *risk disclosures*

Corresponding author. Email: nina.febriana.d@ekonomi.untan.ac.id

How to cite this article. Dosinta, N. F. (2020). *Risk Disclosures* pada Pelaporan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(3), 595-610.

History of article. Received: Agustus 2020, Revision: Oktober 2020, Published: Desember 2020

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v8i3.25105

Copyright©2020. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Bank merupakan salah satu institusi yang berperan penting yang dihadapkan dengan sejumlah risiko dalam kegiatan operasionalnya (Lobo, 2017). Terlebih lagi, selain menjaga dana yang disimpan nasabah, bank juga harus menjaga stabilitas operasional, sehingga kepercayaan publik dapat dipertahankan. Oleh karena itu, bank harus berusaha untuk membangun kepercayaan *stakeholder*, yang

salah satunya adalah melalui pelaporan perusahaan. Laporan tahunan sebagai bagian dari pelaporan perusahaan menjelaskan kondisi suatu entitas (Mediawati & Afiana, 2018) serta menunjukkan pertanggungjawaban perusahaan terhadap sumberdaya yang telah diinvestasikan dari *shareholders* (Healy & Palepu, 2001) guna memenuhi kepentingan dari pengguna pelaporan perusahaan (Mediawati & Afiana, 2018). Pelaporan dan *risk disclosures* tidak

hanya menjadi perhatian besar dari standar akuntansi internasional (Cabedo & Tirado, 2004) namun juga Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Melalui International Accounting Standard Board (IASB) yang diuraikan oleh Epstein & Jermakowicz, (2010) dalam International Accounting Standards (IAS) No. 1 dan juga IAI, (2018) pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 dipaparkan bahwa dalam pelaporan perusahaan mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi ketidakpastian serta *risk disclosures*. Di masa lalu, risiko terlihat negatif, akan tetapi di masa kontemporer, risiko dapat terlihat negatif dan positif (Linsley & Shrives, 2006) karena *stakeholders* membutuhkan lebih banyak *risk disclosures* untuk membuat keputusan sebagai perspektif dualitas risiko (Probohudono et al., 2013). *Risk disclosures* merupakan salah satu bentuk pengungkapan melalui pelaporan perusahaan yang dilakukan pihak manajemen perusahaan sehingga *shareholders*, *stakeholders* serta publik dapat mengakses karakteristik risiko suatu perusahaan (Deumes, 2008). Selain itu, *risk disclosures* dapat mengurangi *gap* antara ekspektasi *shareholders* dengan yang terjadi pada perusahaan (Abraham & Cox, 2007; Botosan, 1997; Deumes, 2008; Taylor et al., 2010) serta untuk menanggapi kebutuhan *stakeholders* dalam hal meningkatkan transparansi (Jensen & Meckling, 1976).

Dalam konteks teori *stakeholder*, perusahaan berperan sebagai *vehicle* untuk koordinasi kepentingan *stakeholders* (Deegan, 2007) serta dinyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tidak terlepas dari keberhasilan pihak perusahaan dalam menjaga hubungan dengan para *stakeholders*, seperti mengkomunikasikan dampak ekonomi, sosial serta lingkungan perusahaan (Hess, 2008). Dalam teori *stakeholder*, kepedulian perusahaan terhadap lingkungan perusahaan akan mempengaruhi pandangan *stakeholders* pada perusahaan (Roberts, 1992). Beberapa pihak tertarik dengan sikap perusahaan terhadap keberlanjutan, sehingga melalui laporan keberlanjutan, dampak sosial dan lingkungan dari tindakan ekonomi perusahaan dapat dikomunikasikan tidak hanya kepada *stakeholders* dan *shareholders* (Frias-Aceituno

et al., 2012), namun pihak eksternal lainnya. Penyajian laporan keberlanjutan mengungkapkan peran perusahaan dalam menerapkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat serta upaya perusahaan dalam memenuhi kepentingan *stakeholders*, yang diantaranya melalui *risk disclosures*. *Stakeholders* akan menggunakan posisinya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang *risk disclosures* tidak hanya untuk memahami profil risiko perusahaan (Muslih & Mulyaningtyas, 2019), namun juga mengambil keputusan yang tepat (Sari & Sholihkah, 2019).

Risk disclosures merupakan informasi penting yang harus dilengkapi sebagai pengungkapan wajib (*mandatory*) dalam laporan tahunan perusahaan (Alsaed, 2006) termasuk perusahaan keuangan. Padahal, *risk disclosures* dimungkinkan tidak hanya terdapat pada laporan tahunan namun juga pada laporan keberlanjutan. Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik agar melaporkan keuangan keberlanjutan dalam pelaporan perusahaan. Karena risiko hadir di hampir setiap aspek operasi bisnis (Lajili & Zéghal, 2005), sehingga *risk disclosures* tidak hanya pada laporan tahunan namun juga dimungkinkan terdapat pada laporan keberlanjutan. Di Indonesia, laporan keberlanjutan merupakan praktik pelaporan Environment Social Governance (ESG) yang bersifat sukarela (*voluntary*) (Dosinta et al., 2018) cenderung bersifat simbolis untuk memenuhi legitimasi perusahaan dengan *stakeholders* sebagai target utama perusahaan (Anugerah et al., 2018), dapat disajikan terpisah dari laporan tahunan atau terintegrasi pada laporan tahunan (Kurnianingsih, 2013), serta sebagai tindakan nyata perusahaan agar *stakeholders* percaya bahwa perusahaan memiliki komitmen dalam menjaga persyaratan sosial dalam lingkungan perusahaan (Anugerah et al., 2018). Oleh karena itu, *risk disclosures* merupakan hal penting bagi pihak mana pun yang tertarik pada perusahaan (Linsley & Shrives, 2006), tidak hanya pada laporan tahunan namun juga laporan

keberlanjutan. Hasil riset Diouf & Boiral, (2017) menunjukkan bahwa perusahaan lebih menyoroti aspek positif dari kinerja keberlanjutan yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan. Berdasarkan hal tersebut, riset ini menarik dikaji lebih lanjut, khususnya pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang diharapkan dapat merealisasikan laporan keberlanjutan dalam pelaporan perusahaan. Sedangkan dari hasil riset Dienes et al., (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah pada suatu perusahaan bukan merupakan salah satu pendorong dilakukannya laporan keberlanjutan.

Dalam era digital industri 4.0, BPD dituntut berinovasi serta mengantisipasi perubahan digitalisasi. Oleh karena itu, diluncurkan program Transformasi BPD pada tanggal 25 Mei 2015. OJK selaku regulator menyusun kerangka kerja program tersebut yang mencakup aspek bisnis dan risiko. Efek kepemilikan pemerintah terhadap risiko operasional bank lebih ambigu, sehingga secara umum, pemerintah harus memberikan perlindungan dikaitkan dengan pengambilan risiko yang lebih tinggi (Demirgüç-Kunt & Detragiache, 2002).

Pelaporan yang sebelumnya bersifat *voluntary* namun dengan adanya regulasi menjadi *mandatory* menyimpan potensi untuk menggali lebih mendalam mengenai alasan yang mendasari perusahaan dalam menyajikan laporan keberlanjutan. Pertama, salah satu strategi yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi, di antaranya dengan penerapan praktik laporan keberlanjutan (Higgins, Stubbs, & Milne, 2015). Kedua, untuk memenuhi ekspektasi *stakeholders* internal dan eksternal (Searcy & Buslovich, 2014). Riset berkenaan dengan *risk disclosures* sudah banyak dilakukan, diantaranya riset sebelumnya pada perusahaan non keuangan di Inggris (Linsley & Shrides, 2006), Malaysia (Sari & Sholihkah, 2019) dan Portugis (Oliveira et al., 2011). Dalam konteks Indonesia, riset berkenaan BPD dilakukan Kansil et al., (2017) hanya fokus pada risiko perbankan, kemudian menggunakan *content analysis* yang diusulkan (Linsley & Shrides, 2006), Geraldina, (2017) menginvestigasi *risk disclosures* pada sektor

infrastruktur serta Syabani & Siregar, (2014) pada perusahaan publik non keuangan. Namun apa yang terjadi jika riset ini akan memberikan sudut pandang yang berbeda mengenai *risk disclosures* menggunakan *content analysis* yang diusulkan (Linsley & Shrides, 2006) sejak diberlakukannya transformasi BPD oleh OJK, karena penting untuk memahami institusi pada suatu negara berkenaan dengan pembahasan yang terkait *disclosures* (Shi et al., 2013) khususnya melalui pelaporan perusahaan. Selanjutnya, Indonesia mempunyai institusi perbankan daerah sehingga menunjukkan keberadaan perbankan pada suatu provinsi di Indonesia.

Berpijak dari riset sebelumnya yang hanya berfokus pada risiko perbankan pada BPD dan riset lainnya yang menggunakan *content analysis* yang diusulkan Linsley & Shrides, (2006) namun berfokus pada laporan tahunan pada sektor infrastruktur dan publik non keuangan, riset ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *risk disclosures* tidak hanya pada laporan tahunan namun juga pada laporan keberlanjutan yang terpisah dari laporan tahunan sejak diberlakukannya Transformasi BPD. Selain berdasarkan hal tersebut, riset Faisal, (2020) dan Oliveira et al., (2011) mengemukakan bahwa teori *agency* cukup kuat menjadi landasan suatu riset dalam menaungi berbagai tingkatan risiko, akan tetapi riset ini menggunakan perspektif teori *stakeholder*. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan riset serta hal-hal yang belum dilakukan riset sebelumnya, riset ini penting dilakukan. Hasil riset ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam aspek akademis berupa pemahaman yang berkaitan dengan *risk disclosures* pada pelaporan BPD dan keterkaitan hasil riset dengan teori *stakeholder*, serta dalam aspek praktis, berupa pemahaman yang didapat dari riset ini dapat dijadikan sebagai alternatif dalam pembuat keputusan masing-masing BPD. Guna mencapai tujuan riset, rancangan riset dimulai dari pendahuluan yang memuat kesenjangan riset, kontribusi kebaruan, kajian literatur serta teori, dilanjutkan metodologi yang memuat desain riset, kemudian hasil dan pembahasan yang juga memuat keterkaitan dengan teori *stakeholder*, serta simpulan yang memuat implikasi riset.

METODOLOGI PENELITIAN

Mengingat tujuan riset utama untuk mengeksplorasi *risk disclosures* tidak hanya dalam laporan tahunan namun laporan keberlanjutan yang terpisah dari laporan tahunan, riset ini menerapkan metode *content analysis* dengan paradigma interpretif yang memiliki beberapa keunggulan, diantaranya deskripsi yang disajikan secara detail dan mendalam (Darmayasa & Aneswari, 2015), serta *content analysis* menghasilkan inferensial dari identifikasi yang obyektif serta sistematis berdasarkan karakteristik *content* tertentu (Jose & Lee, 2007). *Content analysis* tematik yang dikembangkan Beattie et al., (2004) sebagai pendekatan utama untuk mengumpulkan dan menganalisis data.

Riset ini mendokumentasikan serta memeriksa berbagai aspek narasi yang terkandung dalam *risk disclosures*, serta meninjau penekanan relatif. Pendekatan dalam riset ini menawarkan dua keunggulan spesifik. Pertama, memungkinkan *risk disclosures content* diperiksa dan dipahami dalam konteks meningkatnya atau menurunnya permintaan untuk informasi yang lebih luas bagaimana perusahaan dalam menyajikan *risk disclosures*. Kedua, dalam riset ini memungkinkan penyelidikan dilakukan dengan cara yang tidak dibatasi oleh asumsi bahwa perubahan pelaporan bisnis tentu terdapat sesuatu hal yang dapat dipelajari lebih mendalam (Carnegie & Napier, 1996). Dalam riset ini, unit analisis pelaporan yang dipublikasikan dari tahun 2015-2019 pada *websites* masing-masing BPD berupa 130 laporan tahunan, 41 laporan keberlanjutan terpisah dari laporan tahunan, dengan Total (T) 171 laporan, ditunjukkan pada Tabel 1.

Riset ini tidak menggunakan konsistensi periode pada laporan keberlanjutan seperti halnya pada laporan tahunan. Sebagai contoh, dikarenakan BPD Aceh melaporkan laporan keberlanjutan mulai tahun 2017, sehingga unit analisis terdiri dari 5 laporan tahunan dari tahun 2015-2019 serta 2 laporan keberlanjutan terpisah dari laporan tahunan dengan kurun waktu 2017-2018. Berikut kutipan dari Laporan Keberlanjutan Bank Aceh tahun 2017.

“Selamat datang di Laporan Keberlanjutan kami. Tahun ini, Bank

Aceh memulai langkah baru untuk mengungkapkan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan kepada para Pemangku Kepentingan melalui Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) tahun 2017. Laporan ini kami susun untuk pertama kalinya sebagai pelengkap dan bagian dari Laporan Tahunan (*Annual Report*) tahun 2017” (Bank Aceh, 2017: 9).

Tabel 1. Unit Analisis

No.	Nama BPD	Laporan Tahunan	Laporan Keberlanjutan Terpisah	T
1.	Bank Aceh	5	2	7
2.	Bank Bali	5	-	5
3.	Bank Bengkulu	5	-	5
4.	Bank DKI	5	3	8
5.	Bank Jambi	5	-	5
6.	Bank JATENG	5	5	10
7.	Bank BJB	5	5	10
8.	Bank JATIM	5	5	10
9.	Bank KALTIMTARA	5	2	7
10.	Bank KALTENG	5	-	5
11.	Bank KALBAR	5	-	5
12.	Bank KALSEL	5	2	7
13.	Bank Lampung	5	-	5
14.	Bank Maluku Malut	5	-	5
15.	Bank NTB	5	-	5
16.	Bank NTT	5	-	5
17.	Bank Papua	5	-	5
18.	Bank Riau Kepri	5	-	5
19.	Bank SULTRA	5	-	5
20.	Bank SULSELBAR	5	5	10
21.	Bank SULTENG	5	1	6
22.	Bank SULUTGO	5	4	9
23.	Bank Nagari	5	2	7
24.	Bank SUMSEL BABEL	5	3	8
25.	Bank SUMUT	5	2	7
26.	Bank DIY	5	-	5
		130	41	171

Tabel 2. Kategori *Risk Disclosure*

No.	Kategori <i>Risk Disclosure</i>
1.	Risiko keuangan Suku Bunga Kurs Komoditas Likuiditas Kredit
2.	Risiko Operasi Kepuasan Pelanggan Pengembangan produk Efisiensi dan kinerja Sumber Persediaan usang dan susut Kegagalan produk dan layanan Lingkungan Kesehatan dan keselamatan Pengikisan nama merek
3.	Risiko pemberdayaan Kepemimpinan dan manajemen <i>Outsourcing</i> Insentif kinerja Kesiapan dalam perubahan Komunikasi
4.	Risiko pemrosesan informasi dan teknologi Integritas Akses Ketersediaan Infrastruktur
5.	Risiko Integritas Penipuan manajemen dan karyawan Tindakan ilegal Reputasi
6.	Risiko Strategi Pemindaian lingkungan Industri Portofolio Bisnis Pesaing Harga Penilaian Perencanaan Lingkaran kehidupan Pengukuran kinerja Peraturan Berdaulat dan politis

Sumber: Linsley & Shrives, (2006)

Untuk memberikan referensi eksternal tentang *risk disclosures*, riset ini menggunakan *content analysis* diusulkan Linsley & Shrives, (2006), juga digunakan Geraldina, (2017) serta Syabani & Siregar, (2014), disajikan pada Tabel 2. Riset ini dibantu analisis independen

untuk mendapatkan temuan riset yang valid dan memiliki keandalan. Kedua peneliti menginvestigasi aspek *risk disclosures* dalam waktu yang sama (Onwuegbuzie & Leech, 2007) sebagaimana dirujuk Anney, (2014) guna mencapai kesepahaman atas aspek *risk disclosures* tidak hanya dalam laporan tahunan namun juga laporan keberlanjutan, yang dikenal sebagai *investigator triangulation* (Smith, 2015). Kesepahaman atas aspek *risk disclosures* meliputi kesamaan hasil kodifikasi enam aspek, risiko keuangan, risiko operasi, risiko pemberdayaan, risiko pemrosesan informasi dan teknologi, risiko integritas dan risiko strategi. Prosedur yang ditempuh dalam riset ini meliputi pengidentifikasian tema berdasarkan kodifikasi aspek *risk disclosures*, penafsiran makna terkait dengan hasil identifikasi tema, memberikan kode, dan pengambilan kesimpulan. Pemberian kode pada aspek *risk disclosures* diberi kode tangan oleh peneliti, dan kutipan teks untuk berbagai kode divalidasi oleh analisis independen untuk keandalan. Apabila tidak ditemukan kesesuaian, keduanya mengulang kembali serta diskusi untuk kesesuaian temuan. Sehubungan dengan riset ini menggunakan pendekatan teori *stakeholder*, pengambilan kesimpulan tidak hanya berdasarkan hasil kodifikasi, namun juga mengkaitkan dengan peran *stakeholders* pada BPD yang diungkapkan tidak hanya dalam laporan tahunan namun juga laporan keberlanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kodifikasi yang diusulkan Linsley & Shrives, (2006) menunjukkan terdapatnya identifikasi risiko tidak hanya dalam laporan tahunan namun juga dalam laporan keberlanjutan. Dalam pelaporan BPD selama kurun waktu 2015-2019 menunjukkan terdapatnya identifikasi 8 profil risiko, seperti yang terlihat pada Laporan Tahunan Bank SUMSELBABEL tahun 2016 berikut ini.

“Kebijakan mengenai proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta penggunaan sistem informasi manajemen risiko oleh 8 (*delapan*)

risiko (risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategik, kepatuhan dan reputasi) ditetapkan pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko masing-masing risiko” (Bank SUMSEL BABEL, 2016b: 541).

Tidak hanya mengidentifikasi profil risiko, namun dalam laporan tahunan BPD juga mengungkapkan peringkat risiko seperti *low to moderate, moderate* dan sebagainya. Delapan profil risiko tidak hanya dipaparkan dalam Laporan Tahunan Bank SUMSEL BABEL namun juga pada Laporan Keberlanjutan Bank SUMSEL BABEL tahun 2016, sebagaimana kutipan berikut ini.

“Kebijakan manajemen risiko di Bank Sumsel Babel selalu berpedoman pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Penerapan manajemen risiko dapat berjalan efektif sejauh adanya integrasi penuh dari kesadaran risiko (budaya risiko), pengukuran risiko dan strategi pengendaliannya. Bank Sumsel Babel mengelola risiko-risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank yaitu *Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi*” (Bank SUMSEL BABEL, 2016a: 47).

Walaupun dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan terdapat *risk disclosures*, namun dalam laporan tahunan lebih mengurai secara lengkap sistem manajemen risiko serta pengelolaannya untuk setiap jenis-jenis risiko. Uraian lengkap mengenai Sistem Manajemen Risiko dan penerapannya termasuk jenis-jenis risiko dan pengelolaannya disampaikan dalam Laporan Tahunan yang disusun terpisah.

Seperti yang terlihat pada kutipan Laporan Keberlanjutan Bank JATIM tahun 2019 berikut ini.

“Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank Jatim secara berkala selalu memperbarui kebijakan perusahaan sesuai dengan *best practices*, kondisi dan perkembangan lingkungan bisnis Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan harapan mampu mengakomodasi Prinsip dasar tata kelola perusahaan (GCG). Pengelolaan risiko Bank Jatim didasarkan pada Surat Edaran OJK No.14/ SEOJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Uraian lengkap mengenai Sistem Manajemen Risiko dan penerapannya termasuk Jenis-jenis Risiko dan pengelolaannya, disampaikan dalam Laporan Tahunan 2019 Bank Jatim yang disusun terpisah” (Bank JATIM, 2019).

Risiko Strategi

Peraturan sebagai salah satu dari risiko strategi. Dalam penyusunan laporan keberlanjutan, BPD menggunakan pedoman internasional dari *Global Reporting Initiative (GRI)* versi 4.0, seperti yang terlihat pada kutipan Laporan Keberlanjutan Bank SUMSELBABEL tahun 2016 yang menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan disusun guna mengantisipasi segala bentuk risiko serta tantangan yang terkait dengan keberlanjutan bisnis perusahaan.

“Laporan ini juga memuat informasi mengenai kondisi faktual yang terkait dengan program dan pendekatan manajemen yang diterapkan Perusahaan dalam menghadapi dan mengantisipasi segala bentuk risiko serta tantangan yang terkait dengan keberlanjutan bisnis Perusahaan selama periode 1 Januari hingga 31

Desember 2016. Sebagaimana Laporan tahun sebelumnya, dalam menyusun Laporan Keberlanjutan tahun ini, Bank Sumsel Babel mengacu kepada Pedoman Pelaporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting Guidelines*) yang disusun oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) versi 4.0 dengan tingkat kesesuaian “Core” (Bank SUMSEL BABEL, 2016a: 6).

Selain mengacu pada GRI yang merupakan standar internasional dalam mengatur laporan keberlanjutan, Bank SUMUT juga mengadopsi serta mendukung prakarsa internasional seperti COSO Framework dan ISO guna menekan dampak dan risiko dari aspek keberlanjutan, seperti terlihat pada kutipan berikut.

“Bank SUMUT menyadari pentingnya peran pelibatan berbagai pemangku kepentingan guna menekan dampak dan risiko atas aspek keberlanjutan. Untuk itu, Bank SUMUT berupaya untuk turut aktif maupun memberikan dukungan dalam inisiatif-inisiatif eksternal sebagai upaya bersama dalam menjaga keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hingga tahun 2017, Bank SUMUT mengadopsi sejumlah prakarsa internasional seperti COSO Framework dan ISO 26000” (Bank SUMUT, 2017:67).

Penilaian merupakan bagian dari risiko strategi perusahaan terdapat pada Laporan Keberlanjutan Bank KALTIMTARA tahun 2018. Terdapat misi memprioritaskan kepatuhan dan manajemen risiko yang berkualitas sebagaimana terlihat dalam kutipan berikut ini.

“Misi (1) Memperkuat ketahanan kelembagaan melalui pelaksanaan kepatuhan dan manajemen risiko yang berkualitas (Bank KALTIMTARA, 2018:3).

Berkenaan dengan keuangan berkelanjutan, berdasarkan kodifikasi peraturan,

pengungkapan keuangan berkelanjutan tidak hanya dalam laporan tahunan, namun juga laporan keberlanjutan. Berikut kutipan dari Laporan Tahunan Bank Bengkulu tahun 2019 yang menunjukkan bahwa Bank Bengkulu selaku bank yang belum *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menerapkan keuangan berkelanjutan sebagaimana yang telah diatur oleh POJK.

“Menindak-lanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Bank Bengkulu telah menerapkan Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud oleh Regulator” (Bank Bengkulu, 2019: 354).

“Tahun 2019 juga menjadi tonggak baru bagi kami dalam proses implementasi keuangan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang salah satunya mewajibkan pembuatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)” (Bank SULSELBAR, 2019: 18).

Dengan diberlakukannya regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan, (2017), penerapan keuangan berkelanjutan tidak hanya pada perusahaan keuangan yang sudah *go public* di BEI namun juga yang belum *listing* di BEI. Kutipan dari Laporan Keberlanjutan Bank SULSELBAR tahun 2019 menunjukkan pemenuhan terhadap regulasi dari OJK tersebut khususnya berkenaan keuangan berkelanjutan.

Risiko Integritas

Pada Laporan Keberlanjutan Bank DKI tahun 2017 terlihat upaya integritas Bank DKI dengan menyelesaikan permasalahan yang menimbulkan potensi risiko.

“...Bank DKI terus berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang dapat menimbulkan potensi risiko, yang antara lain melakukan penyelesaian terhadap temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas pengawas lainnya” (Bank DKI, 2017:4).

Begitu juga dengan Bank Sulawesi Utara yang telah menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran untuk mengurangi risiko terhadap adanya pelanggaran. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan dalam Laporan Keberlanjutan Bank SULUTGO tahun 2018.

“Bank SulutGo telah menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Internal Perusahaan untuk mengurangi risiko terhadap adanya pelanggaran juga sebagai media pelaporan dalam mencegah dan mendeteksi adanya potensi pelanggaran etika maupun hukum dalam Perusahaan” (Bank SULUTGO, 2018: 62).

Risiko Operasi

Pengembangan produk, kesehatan dan keselamatan yang merupakan bagian dari risiko operasi terdapat pada Laporan Keberlanjutan Bank Aceh tahun 2017, sebagaimana terlihat dalam kutipan berikut ini yang menunjukkan bahwa keberlanjutan bisnis tidak terlepas dari inovasi produk, kesehatan dan keselamatan pekerja, namun juga keterlibatan dalam pemberdayaan masyarakat.

“Laporan Keberlanjutan ini menyajikan secara transparan, akuntabel dan berimbang mengenai strategi dan upaya yang kami lakukan untuk menjaga keberlanjutan bisnis terutama inovasi produksi, praktek kerja yang baik, kesehatan dan keselamatan kerja, kegiatan pelestarian lingkungan, tata kelola dan manajemen

risiko serta pemberdayaan masyarakat” (Bank Aceh, 2018: 27).

Lingkungan yang merupakan bagian dari risiko operasi terdapat pada Laporan Keberlanjutan BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, seperti terlihat dalam kutipan berikut ini berkenaan kepedulian Bank SULSELBAR dalam *green banking*.

“Di saat *go green* – gerakan kepedulian untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan – tumbuh semakin kuat, maka keberadaan *green banking* atau bank yang ramah lingkungan harus juga diperkuat. Prinsip dasar *green banking* adalah upaya memperkuat kemampuan manajemen risiko bank, khususnya yang terkait dengan lingkungan hidup, dan mendorong perbankan untuk meningkatkan portofolio pembiayaan ramah lingkungan hidup, seperti ke energi terbarukan dan pertanian organik.” (Bank SULSELBAR, 2018:92).

Risiko Keuangan

Kredit yang merupakan bagian dari risiko keuangan, terdapat pada Laporan Keberlanjutan Bank BJB, seperti terlihat dalam kutipan berikut ini berkenaan kepedulian Bank BJB yang tidak hanya pada pemenuhan syarat minimum dalam pemberian kredit namun juga penilaian risiko kredit secara objektif serta realistis sehingga menghasilkan skor risiko.

“Bank menempatkan *risk rating tools* sebagai salah satu upaya untuk mengklasifikasikan tingkat risiko dari setiap debitur, menetapkan kualitas debitur, kualitas fasilitas kredit, tingkat kewenangan memutus kredit, besarnya pemenuhan agunan, penetapan cadangan penghapusan kredit dan penetapan *pricing* kepada debitur. Selain itu juga, bank memiliki *Risk Scoring System* untuk menilai risiko kredit secara obyektif dan realistis, sehingga menghasilkan skor risiko

yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan biaya risiko dan untuk perencanaan dan manajemen portofolio.” (Bank BJB, 2018: 98).

Risiko Pemrosesan Teknologi dan Informasi

Ketersediaan infrastruktur pemrosesan teknologi dan informasi tidak hanya mendukung dalam pengembangan bisnis, namun juga mendukung Divisi Manajemen Risiko dalam pengelolaan profil risiko. Hal ini telah dilakukan Bank Papua sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2018 berikut ini.

“Dalam pengembangan bisnis, manajemen telah memperkuat infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis Bank Papua diantaranya melalui proses pembangunan Electronic Loan System (E-Los) yaitu suatu sistem yang akan digunakan dalam proses analisis kredit oleh Divisi Bisnis UMK dan Konsumer untuk dipergunakan dalam menganalisis Kredit konsumer, kredit UMK dan ... Pembangunan Data Warehouse/ Management Information System (MIS) Bank Papua, yaitu suatu media yang akan dapat digunakan untuk mendukung Divisi Manajemen Risiko Bank untuk pengelolaan profil risiko, Divisi Kepatuhan untuk keperluan pelaporan APU/ PTT, Divisi Perencanaan Strategis untuk penyusunan dan monitoring Rencana Bisnis Bank (RBB); penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional (SKN) yang saat ini dikelola oleh Kantor Cabang oleh Divisi Treasury; Peningkatan security aplikasi dan jaringan; serta Capacity planning bandwidth” (Bank Papua, 2018: 47).

Risiko Pemberdayaan

Kesiapan dalam menghadapi perubahan yang merupakan bagian dari risiko pemberdayaan terdapat pada Laporan Keberlanjutan Bank

SULTENG tahun 2019, sebagaimana terlihat dalam kutipan berikut ini yang menunjukkan bahwa transformasi digital sebagai langkah awal menghadapi tantangan persaingan usaha.

“Perkembangan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 atau yang dikenal dengan era Digital telah memicu persaingan usaha secara digital. Potensi penerapan teknologi menjadi tantangan baru bagi pelaku bisnis agar bisa bersaing dalam kompetisi yang ketat. Transformasi digital adalah langkah awal untuk menghadapi tantangan ini” (Bank SULTENG, 2019: 3).

Kesiapan dalam perubahan merupakan bagian dari risiko pemberdayaan yang menunjukkan bagian dari langkah transformasi. Bank SULTRA dan Bank KALBAR menyadari bahwa transformasi BPD menjadikan BPD memiliki daya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah, seperti terlihat pada kutipan dalam Laporan Tahunan Bank SULTRA dan Laporan Tahunan Bank KALBAR berikut ini.

“Merujuk pada Program Transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang telah dicanangkan oleh Bapak Joko Widodo (Presiden RI) di Jakarta bulan Mei 2015. Visi program tersebut adalah menjadikan BPD yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi” (Bank SULTRA, 2017: 22).

“Bank Kalbar memasuki usianya yang ke-53 tahun dengan beberapa pencapaian penting yang bersinergi dengan Transformasi BPD untuk menjadikan Bank Kalbar berdaya saing tinggi serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah” (Bank KALBAR, 2017: 5).

Kesiapan dalam menerima perubahan yang termasuk bagian dari risiko pemberdayaan menunjukkan bahwa BPD memiliki kesiapan dalam transformasi BPD guna peningkatan serta perbaikan yang tidak hanya berfokus pada nasabah namun juga *stakeholders* dan *shareholders* serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan, seperti terlihat dalam kutipan Laporan Keberlanjutan Bank JATIM tahun 2018 berikut ini.

“Tekad dan semangat untuk bertransformasi dilakukan dengan tidak melupakan kepedulian akan ramah lingkungan yang mendukung Sustainable Development Goals (SDGs). Pada saat yang sama, Bank JATIM mengimplementasikan program Transformasi BPD demi peningkatan dan perbaikan yang berfokus pada kepuasan nasabah, pemangku kepentingan dan pemegang saham. Bank Jatim terus mempersiapkan diri mengembangkan teknologi melalui perbankan digital demi bersiap menghadapi tantangan yang dihadapi Jawa Timur di masa mendatang. Dengan demikian Bank Jatim bersiap menjadi Bank Berkelanjutan” (Bank JATIM, 2018:3).

Transformasi BPD, Risiko dan Stakeholders

Kemampuan BPD dalam melaksanakan manajemen risiko yang optimal mengantarkan BPD memiliki optimisme tidak hanya menghadapi perkembangan ekonomi pada tahun 2019 namun juga mampu mewujudkan bank mencapai agen pembangunan daerah sesuai dengan visi transformasi BPD, seperti terlihat pada kutipan Laporan Keberlanjutan Bank Nagari berikut ini.

“Optimisme perkembangan ekonomi pada tahun 2019 yang diperkirakan mengalami perbaikan ke arah yang lebih baik menyebabkan Bank Nagari optimis untuk mampu mewujudkan bank

mencapai visi dan misi menjadi agen pembangunan daerah sesuai dengan visi transformasi BPD melalui kemampuan melayani masyarakat yang disusun dengan perbaikan berkelanjutan dalam hal proses bisnis internal Bank. Hal ini dilakukan dengan mengacu kepada arah dan kebijakan pengembangan usaha bank antara lain memelihara momentum pertumbuhan bisnis bank, mempertahankan dan meningkatkan penguasaan pangsa pasar bank serta melaksanakan Manajemen Risiko yang optimal berdasarkan Profil Risiko, Good Corporate Governance, Rentabilitas, dan Permodalan” (Bank Nagari, 2018: 70).

Dalam melaksanakan manajemen risiko yang optimal, sebagai perusahaan dalam sektor keuangan, diperlukan pengelolaan risiko-risiko yang tetap berpegang teguh pada standar kode etik perbankan melalui Rencana Aksi Keuangan Keberlanjutan (RAKB) guna memenuhi kebutuhan tidak hanya nasabah namun juga *stakeholders* demi bisnis yang berkelanjutan. Berikut kutipan Laporan Keberlanjutan Bank BJB 2019.

“Kami berkomitmen memberikan jasa keuangan yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang didasarkan kepada praktek pembiayaan yang bertanggungjawab. Melalui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), perseroan menunjukkan komitmen dalam bertindak secara bertanggung jawab, mengelola risiko-risiko, dan tetap berpegang teguh kepada standar standar kode etik perbankan seperti anti korupsi. Dengan melakukan hal tersebut, perseroan secara konstan berusaha memenuhi kebutuhan nasabah dan pemangku kepentingan serta menjaga kepercayaan nasabah demi kontinuitas bisnis” (Bank BJB, 2019: 183).

Dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif akan meningkatkan *stakeholder value*, sehingga memberikan manfaat bagi bank, seperti terlihat pada kutipan dalam Laporan Keberlanjutan Bank SULTENG berikut ini.

“Penerapan manajemen risiko yang efektif akan memberikan manfaat bagi Bank karena akan meningkatkan *stakeholder value* dan dapat memberikan gambaran mengenai kemungkinan risiko yang harus ditanggung Bank di masa mendatang” (Bank SULTENG, 2019: 5).

Stakeholders merupakan pihak yang mendapatkan prioritas awal dalam penetapan isi laporan keberlanjutan. Seperti halnya dalam kutipan pada Laporan Keberlanjutan Bank KALSEL, terlihat *stakeholders inclusiveness* pada urutan teratas.

“Proses penetapan isi laporan dilakukan dengan berupaya menerapkan 4 (empat) prinsip yang disyaratkan oleh GRI G4, yaitu *stakeholders inclusiveness* (pelibatan pemangku kepentingan), *materiality* (materialitas), *sustainability context* (konteks keberlanjutan) dan *completeness* (kelengkapan)” (Bank KALSEL, 2015).

Pemerintah dan OJK merupakan salah satu *stakeholders* penting yang diungkapkan pada Laporan Tahunan Bank KALSEL dalam rangka meningkatkan *stakeholder engagement*. Dalam kutipan tersebut menunjukkan pendekatan dan respon Bank KALSEL melalui pelaporan pelaksanaan kepatuhan dengan penyusunan RAKB dan laporan keberlanjutan berkenaan topik pembahasan keuangan berkelanjutan sebagai wujud kepatuhan pada peraturan dan perundang-undangan yang telah diatur Pemerintah dan OJK. Berikut kutipan bagian dari *stakeholders* penting dalam program kerja yang terdampak dari kegiatan perusahaan telah diidentifikasi oleh Bank KALSEL.

Pemangku Kepentingan	Topik Pembahasan	Pendekatan dan Respon Bank KALSEL
Pemerintah & OJK (Legal dan Kepentingan LJK)	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan pada peraturan dan perundang-undangan • Analisa risiko lingkungan & sosial dalam pemberian kredit • Anti Bribery and Anti Bribery and Corruption (ABC), Anti-Money Laundering (AML) and Anti Terrorism • <i>Green banking</i> • <i>Inclusive banking</i> • Keuangan Berkelanjutan 	Pelaporan pelaksanaan kepatuhan & notifikasi pada Bank Indonesia Basel II Accord-Basel Committee Pelaporan kepatuhan aspek syariah pada Dewan Syariah Nasional, penyediaan ATM, Penyusunan RAKB dan Laporan Keberlanjutan

(Bank KALSEL, 2019: 610)

Bank JATENG meyakini keterlibatan *stakeholders* berperan dalam menunjang keberhasilan serta kesuksesan perusahaan tidak hanya keberhasilan ekonomi yang mencakup aspek *profit*, namun juga dalam aspek *people* dan *planet*. Dengan pemikiran tersebut, turut mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals – SDG’s*) sebagai wujud nyata dari komitmen Bank JATENG dalam menjaga keharmonisan tidak hanya kepentingan ekonomi dan sosial, namun juga lingkungan hidup di semua aktivitas aspek operasional perusahaan, seperti terlihat kutipan dari Laporan Keberlanjutan Bank JATENG berikut ini.

“ Bank Jateng meyakini bahwa aspek keterlibatan pemangku kepentingan (*people dan planet*) berperan serta menunjang tingkat keberhasilan dan

kesuksesan Perusahaan di samping aspek keberhasilan ekonomi (*economy*). Berangkat dari pemikiran tersebut, Bank Jateng sebagai entitas usaha di bidang perbankan turut mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals – SDG's*) sebagai wujud nyata dari komitmen Bank Jateng yang senantiasa berupaya menghadirkan harmoni antara kepentingan ekonomi, sosial, serta lingkungan hidup dalam seluruh aktivitas operasional Perusahaan” (Bank JATENG, 2019: 29).

Teori Stakeholder dan Risk Disclosures

Hasil riset ini menunjukkan bahwa *risk disclosures* yang terdapat pada laporan keberlanjutan tidak hanya dipublikasikan pada BPD yang telah *go public* di Bursa Efek Indonesia seperti Bank JABAR dan Bank JATIM, namun juga dipublikasikan pada BPD yang belum *go public*. Hal ini menunjukkan bahwa BPD tidak hanya berupaya mendeteksi risiko yang diungkapkan dalam laporan tahunan namun juga mengantisipasi risiko keuangan berkelanjutan dalam laporan keberlanjutan. Dari hasil riset ini juga menunjukkan terdapat keselarasan dengan teori *stakeholder*. Laporan tahunan dan laporan keberlanjutan merupakan salah satu bentuk komunikasi perusahaan kepada *stakeholders* dalam memenuhi kepentingan *stakeholders*.

Risk disclosures sebagai salah bentuk pertanggungjawaban BPD selaku perusahaan yang bergerak dalam sektor keuangan menunjukkan bahwa perusahaan selalu mengutamakan *stakeholders* dalam setiap aspek perubahan perusahaan, termasuk Transformasi BPD untuk memenuhi kepentingan *stakeholders*. Pemerintah dan OJK selaku regulator BPD merupakan salah satu *stakeholder* penting bagi BPD yang telah menyusun kerangka kerja program Transformasi BPD. Berdasarkan hasil salah satu kodifikasi *risk disclosures* yang diusulkan Linsley & Shrives, (2006) pada pelaporan BPD menunjukkan bahwa melalui

program transformasi menjadikan BPD tidak hanya memiliki daya saing yang tinggi serta kuat namun juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan serta pemerataan ekonomi daerah di Indonesia.

Stakeholders yang menjadi bagian dari suatu perusahaan, selayaknya menginginkan untuk bertahan dalam kelangsungan perusahaan yang salah satu upayanya memprioritaskan keberlanjutan (Dosinta & Brata, 2020). Upaya memprioritaskan keberlanjutan merupakan salah satu penerapan dari *going concern*. Perusahaan ingin terus berkelanjutan, diantaranya dengan mengantisipasi terjadinya *accounting failure* dalam pelaporan perusahaan melalui *risk disclosures* (Linsley & Shrives, 2009).

Keenam *risk disclosures* yang diusulkan Linsley & Shrives, (2006) tidak hanya terdapat pada laporan tahunan perusahaan non keuangan di Inggris, sebagaimana riset Linsley & Shrives, (2006) dan perusahaan publik non keuangan di Indonesia, dalam riset (Syabani & Siregar, 2014), kemudian perusahaan pada sektor infrastruktur di Indonesia, dalam riset Geraldina, (2017), namun dalam hasil riset ini menunjukkan bahwa *risk disclosures* terdapat di dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan pada pelaporan BPD yang merupakan perusahaan dalam sektor keuangan di Indonesia.

Abid & Shaiq, (2015) dengan hasil risetnya pada pelaporan perusahaan yang listing di *Karachi Stock Exchange (KSE) 100 index* Pakistan menunjukkan terdapat *risk disclosures* tidak hanya yang pada pelaporan yang bersifat *mandatory*, namun juga *voluntary*. Hasil riset Aldi & Djakman, (2020) mengemukakan bahwa perusahaan memiliki motivasi dalam penyusunan laporan keberlanjutan guna berkontribusi kepada masyarakat dan negara yang sesuai konsep *People, Profit dan Planet*. Namun demikian, belum adanya standar laporan keberlanjutan yang diberlakukan *standar setter* di Indonesia, sehingga perusahaan menggunakan standar yang berlaku secara global (Nur et al., 2019).

SIMPULAN

Hasil riset ini menunjukkan bahwa *risk disclosures* tidak hanya terdapat pada laporan tahunan namun juga terdapat pada laporan keberlanjutan yang terpisah dari laporan tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa BPD tidak hanya berupaya mendekteksi risiko yang diungkapkan dalam laporan tahunan namun juga mengantisipasi risiko keuangan berkelanjutan dalam laporan keberlanjutan.

Risk disclosures sebagai salah bentuk pertanggungjawaban BPD selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan menunjukkan bahwa perusahaan selalu mengutamakan *stakeholders* dalam setiap aspek perubahan perusahaan, termasuk transformasi BPD untuk memenuhi kepentingan *stakeholders*. Melalui program transformasi menjadikan BPD tidak hanya memiliki daya saing yang tinggi serta kuat namun juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan serta pemerataan ekonomi daerah di Indonesia. Oleh karena itu, riset ini tidak hanya memiliki implikasi secara praktis namun juga memiliki implikasi secara teoritis khususnya dari teori *stakeholder*.

Riset ini menggunakan kodifikasi *content analysis* berdasarkan pilihan subjektivitas peneliti serta dilakukan pada BPD yang dikaitkan dengan program transformasi. Hasil riset berikutnya mungkin akan berbeda jika menggunakan kodifikasi *content analysis* yang sama namun digunakan pada sektor yang berbeda kemudian dikaitkan dengan program lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sehubungan dengan saran penyempurnaan pada manuskrip artikel, diucapkan terima kasih kepada Dewan Redaksi, Reviewer dan analis independen. Terima kasih juga diucapkan kepada FEB UNTAN atas dukungan pendanaan pada riset ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abid, A., & Shaiq, M. (2015). A Study of Risk Disclosures in the Annual Reports of Pakistani Companies: A Content Analysis. *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(11), 14–25.

- Abraham, S., & Cox, P. (2007). Analysing the determinants of narrative risk information in UK FTSE 100 annual reports. *British Accounting Review*, 39(3), 227–248. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2007.06.002>
- Aldi, B., & Djakman, C. D. (2020). Persepsi Manajemen dan Stakeholders pada Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Sustainability Reporting. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 405–430. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.21639>
- Alsaeed, K. (2006). The association between firm-specific characteristics and disclosure: The case of Saudi Arabia. *Managerial Auditing Journal*, 21(5), 476–496. <https://doi.org/10.1108/02686900610667256>
- Anney, V. N. (2014). Ensuring the quality of the findings of qualitative research: looking at trustworthiness criteria. *Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies*, 5(2), 272–281.
- Anugerah, E. G., Saraswati, E., & Andayani, W. (2018). Quality Of Disclosure And Corporate Social Responsibility Reporting Practices In Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 22(3), 337–353. <https://doi.org/10.24912/ja.v22i3.392>
- Bank Aceh. (2017). *Laporan Keberlanjutan*. <http://www.bankaceh.co.id/>
- Bank Aceh. (2018). *Laporan Keberlanjutan*. <http://www.bankaceh.co.id/>
- Bank Bengkulu. (2019). *Laporan Tahunan*. <https://www.bankbengkulu.co.id/>
- Bank BJB. (2018). *Laporan Keberlanjutan*. <https://www.bankbjb.co.id>
- Bank BJB. (2019). *Laporan Keberlanjutan*. <https://www.bankbjb.co.id>
- Bank DKI. (2017). *Laporan Keberlanjutan*. <https://www.bankdki.co.id>
- Bank JATENG. (2019). *Laporan Keberlanjutan*. <https://www.bankjateng.co.id/>
- Bank JATIM. (2018). *Laporan*

- Keberlanjutan*.
<https://www.bankjatim.co.id>
- Bank JATIM. (2019). *Laporan Keberlanjutan*.
<https://www.bankjatim.co.id>
- Bank KALBAR. (2017). *Laporan Tahunan*.
www.bankkalbar.co.id
- Bank KALSEL. (2015). *Laporan Keberlanjutan*.
<http://www.bankkalsel.co.id>
- Bank KALSEL. (2019). *Laporan Tahunan*.
<https://www.bankkalsel.co.id>
- Bank KALTIMTARA. (2018). *Laporan Keberlanjutan*.
<https://www.bankaltimtara.co.id>
- Bank Nagari. (2018). *Laporan Keberlanjutan*.
<https://www.banknagari.co.id/>
- Bank Papua. (2018). *Laporan Tahunan*.
www.bankpapua.co.id
- Bank SULSELBAR. (2018). *Laporan Keberlanjutan*.
<https://banksulselbar.co.id/>
- Bank SULSELBAR. (2019). *Laporan Keberlanjutan*.
<https://banksulselbar.co.id>
- Bank SULTENG. (2019). *Laporan Keberlanjutan*.
<https://www.bankstulteng.co.id/>
- Bank SULTRA. (2017). *Laporan Tahunan*.
<https://banksultra.co.id>
- Bank SULUTGO. (2018). *Laporan Keberlanjutan*.
<https://www.banksulutgo.co.id>
- Bank SUMSEL BABEL. (2016a). *Laporan Keberlanjutan*.
<https://www.banksumselbabel.com/>
- Bank SUMSEL BABEL. (2016b). *Laporan Tahunan*.
<https://www.banksumselbabel.com/>
- Bank SUMUT. (2017). *Laporan Keberlanjutan*.
<https://www.banksumut.co.id/>
- Beattie, V., McInnes, B., & Fearnley, S. (2004). A Methodology for Analysing and Evaluating Narratives in Annual Reports: A Comprehensive Descriptive Profile and Metrics for Disclosure Quality Attributes. *Accounting Forum*, 28(3), 205–236.
<https://doi.org/10.1016/j.accfor.2004.07.001>
- Botosan, C. A. (1997). Disclosure Level and the Cost of Equity Capital. *Accounting Review*, 72(3), 323–349.
- Cabedo, J. D., & Tirado, J. M. (2004). The Disclosure of Risk in Financial Statement. *Accounting Forum*, 28(2), 181–200.
<https://doi.org/10.1016/j.accfor.2003.10.002>
- Carnegie, G. D., & Napier, C. J. (1996). Critical and Interpretive Histories : Insights into Accounting's Present and Future Through Its Past. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 9(3), 7–39.
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015). Paradigma Interpretif Pada Penelitian Akuntansi Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 341–511.
<https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6028>
- Demirgüç-Kunt, A., & Detragiache, E. (2002). Does deposit insurance increase banking system stability? An empirical investigation. *Journal of Monetary Economics*, 49(7), 1373–1406.
[https://doi.org/10.1016/S0304-3932\(02\)00171-X](https://doi.org/10.1016/S0304-3932(02)00171-X)
- Deumes, R. (2008). Corporate Risk Reporting A Content Analysis of Narrative Risk Disclosures in Prospectuses. *Journal of Business Communication*, 45(2), 120–157.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0021943607313992>
- Dienes, D., Sassen, R., & Fischer, J. (2016). What are the drivers of sustainability reporting? A systematic review. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 7(2), 154–189.
<https://doi.org/10.1108/SAMPJ-08-2014-0050>
- Diouf, D., & Boiral, O. (2017). The quality of sustainability reports and impression management: A stakeholder perspective. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 30(3), 643–667.
[608 | Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.8 | No.3 | 2020](https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2015-</p></div><div data-bbox=)

- 2044
- Dosinta, N. F., & Brata, H. (2020). Politik Penamaan di Dalam Pelaporan Korporat Pascaimplementasi Integrated Reporting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 138–158. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.09>
- Dosinta, N. F., Brata, H., & Heniwati, E. (2018). Haruskah Value Creation Hanya Terdapat Pada Integrated Reporting? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 248–266. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9015>
- Epstein, B. J., & Jermakowicz, E. K. (2010). *Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Faisal, M. (2020). Karakteristik CEO dan Enterprise Risk Management. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 109–120. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i1.20741>
- Frias-Aceituno, J. V., Rodriguez-Ariza, L., & Garcia-Sanchez, I. M. (2012). The Role of the Board in the Dissemination of Integrated Corporate Social Reporting. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. <https://doi.org/10.1002/csr.1294>
- Geraldina, I. (2017). The Quality of Risk Disclosure: Evidence from Infrastructure Industry in Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 211–230. <https://doi.org/10.24815/jdab.v4i2.8053>
- Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. *Journal of Accounting and Economics*, 31(1–3), 405–440. [https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(01\)00018-0](https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00018-0)
- Hess, D. (2008). The three pillars of corporate social reporting as new governance regulation: Disclosure, dialogue and development. *Business Ethics Quarterly*, 18(4), 447–482.
- IAI. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Per Efektif 1 Januari 2018*. Jakarta: Divisi Penerbitan IAI.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firms: Managerial Behaviour, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Jose, A., & Lee, S. M. (2007). Environmental Reporting of Global Corporations: A Content Analysis Based on Website Disclosures. *Journal of Business Ethics*, 72(4), 307–321. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9172-8>
- Kansil, D., Murni, S., & Tulung, J. E. (2017). Pengaruh Risiko Perbankan Terhadap Kinerja Keuangan Tahun 2013-2015 (Bank Pembangunan Daerah Se-Indonesia). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(3), 3508–3517.
- Kurnianingsih, H. T. (2013). Pengaruh Profitabilitas Dan Size Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(1), 1–14.
- Lajili, K., & Zéghal, D. (2005). A Content Analysis of Risk Management Disclosures in Canadian Annual Reports. *Canadian Journal of Administrative Sciences*, 22(2), 125–142. <https://doi.org/10.1111/j.1936-4490.2005.tb00714.x>
- Linsley, P. M., & Shrive, P. J. (2006). Risk reporting: A study of risk disclosures in the annual reports of UK companies. *The British Accounting Review*, 38, 387–404. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2006.05.002>
- Linsley, P. M., & Shrive, P. J. (2009). Mary Douglas, risk and accounting failures. *Critical Perspectives on Accounting*, 20(4), 492–508. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2008.05.004>
- Lobo, G. J. (2017). Accounting research in

- banking – A review. *China Journal of Accounting Research*, 10(1), 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2016.09.003>
- Mediawati, E., & Afiana, I. F. (2018). Dewan Pengawas Syariah dan Pengungkapan Sukarela Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 259–268. <https://doi.org/10.17509/jrak.v6i2.12787>
- Muslih, M., & Mulyaningtyas, C. T. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Risiko. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 11(1), 179–188. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.17303>
- Nur, F., Saraswati, E., & Andayani, W. (2019). Determinan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Nilai Perusahaan: Kasus Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 213–228. <https://doi.org/10.24815/jdab.v6i2.14087>
- Oliveira, J., Rodrigues, L. L., & Russell Craig. (2011). Risk-related disclosures by non-finance companies: Portuguese practices and disclosure characteristics. *Managerial Auditing Journal*, 26(9), 817–839. <https://doi.org/10.1108/026869011111171466>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Penerapan-Keuangan-Berkelanjutan-bagi-Lembaga-Jasa-Keuangan,-Emiten,-dan-Perusahaan-Publik/SAL-POJK-51-keuangan-berkelanjutan.pdf>
- Probohudono, A. N., Tower, G., & Rusmin, R. (2013). A risky tale of two countries. *Asian Review of Accounting*, 21(3), 257–272. <https://doi.org/10.1108/ARA-04-2012-0017>
- Roberts, R. W. (1992). Determinants of corporate social responsibility disclosure: an application of stakeholder theory. *Accounting, Organizations and Society*, 17(6), 595–612. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(92\)90015-K](https://doi.org/10.1016/0361-3682(92)90015-K)
- Sari, S. P., & Sholihkah, H. (2019). Liquid ity Risk Disclosure: A Review of Corporate Governance. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 147–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i2.8723>
- Shi, C., Pukthuanthong, K., & Walker, T. (2013). Does Disclosure Regulation Work? Evidence from International IPO Markets. *Contemporary Accounting Research*, 30(1), 356–387. <https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2012.01158.x>
- Smith, M. (2015). *Research Methods in Accounting*. London: Sage Publications.
- Syabani, A., & Siregar, S. V. (2014). Determinants of Risk Disclosure Level : Case of Indonesia. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 17(2), 207–226. <https://doi.org/http://doi.org/10.33312/ijar.398>
- Taylor, G., Tower, G., & Neilson, J. (2010). Corporate communication of financial risk. *Accounting and Finance*, 50(2), 417–446. <https://doi.org/10.1111/j.1467-629X.2009.00326.x>